

Simanjuntak, M.E.R., Manggalou, S (2024). Implementasi Pengangkatan Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. *Prediksi*. Vol. 23 (1) 48-56.

Implementasi Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Maria Equina Rotua Simanjuntak¹, Singgih Manggalou.^{2*}

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: ¹maria.equina27@gmail.com, ²singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

20 Januari 2024

Received in revised form:

21 Februari 2024

Accepted:

16 Maret 2024

Keyword:

Adoption, Abandoned Children, Implementation

Kata Kunci:

Adopsi, Anak Terlantar, Implementasi

ABSTRACT

The phenomenon of abandoned children or children who do not have parents is a quite complex problem in various countries, especially Indonesia. This problem requires good handling in dealing with this problem. The government through Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption of Children is one of the solutions to the problem of abandoned children so that children have rights in child welfare. This research aims to find out how the child adoption process works in overcoming the problem of abandoned children in East Java. This research uses the theory of public policy implementation according to George C. Edward III and uses descriptive research methods with a qualitative approach according to Creswell. Information and data collection in this research used interview techniques. The results of the research show that communication runs well and continuously, dispositions are carried out in accordance with functions and responsibilities, resources are clearly utilized as they should be, and the bureaucratic structure is appropriate. Based on the implementation theory put forward by Edward III, the adoption or adoption process can run and be successful if all of these factors are implemented.

ABSTRAK

Fenomena anak terlantar atau anak yang tidak memiliki orang tua menjadi permasalahan yang cukup kompleks di berbagai negara khususnya Negara Indonesia. Permasalahan tersebut memerlukan adanya penanganan yang baik dalam menangani permasalahan tersebut. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yang merupakan salah satu solusi dalam masalah anak terlantar supaya anak mendapat hak dalam kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pengangkatan anak dalam mengatasi masalah anak terlantar di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III dan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Creswell. Pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi berjalan dengan baik dan berkesinambungan, disposisi yang dilaksanakan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sumber daya yang jelas dimanfaatkan sebagaimana mustinya, serta struktur birokrasi sudah tepat. Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa proses pengangkatan anak atau Adopsi dapat berjalan dan berhasil apabila secara keseluruhan faktor tersebut terlaksana.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan forum pendidikan yang pertama dan utama dalam sejarah hidup sang anak yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri (Ainemer et al., 1990). Ayah dan ibu akan mempunyai peran penting sebagai orang yang akan membimbing anak-anaknya. Kehadiran dan kelengkapan orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwa anak. Ketika anak kehilangan sosok peran ayah dan ibunya akan berakibat pada proses tumbuh kembang anak yang akan merasakan kehilangan hak nya untuk dibina, dibimbing, diperhatikan, mendapat kasih sayang dan masih banyak lagi (Rakhmawati, 2015). Perkembangan emosi anak seharusnya dipantau sejak dini karena jika tidak ada peran orangtua yang memantau perkembangan tersebut akan menjadikan anak menjadi seorang yang agresif.

Menurut Carter, Briggs-Gowan dan Davis (2004) dalam (Harmaini, 2013) bukan hanya pengasuhan, perkembangan dalam beradaptasi anak-anak yang berusia muda dapat dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas, seperti kemiskinan, kekerasan, dan pendidikan orangtua rendah serta terbatasnya dukungan sosial. Lingkungan luar juga dapat mempengaruhi bagaimana anak berkembang. Jika orangtua sibuk untuk bekerja diluar rumah akan berpengaruh dalam perkembangan adaptif sosial anak, moral anak dan emosional anak. Agar orangtua dapat melaksanakan perannya dengan baik maka orangtua perlu untuk memahami bagaimana tingkat perkembangan anak lebih dalam dan mempunyai motivasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. (Harmaini, 2013)

Seperti yang kita ketahui bahwa peran kedua orang tua sangat penting untuk pertumbuhan dan tumbuh kembang anak. Dalam faktanya yang terjadi di lapangan banyak anak yang lahir sudah tidak mempunyai orangtua serta ada juga anak kurang beruntung yang ditinggalkan orangtuanya meninggal saat masih di bawah umur ataupun terdapat anak yang ditinggalkan orangtuanya untuk hidup sendirian karena orangtuanya tidak mau bertanggung jawab atas anaknya untuk memberikan peran orangtua dalam mendidik, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang dan lain sebagainya.

Gambar 1.1 Jumlah Anak Yatim Piatu Dunia



Berdasarkan gambar di atas, banyak anak yang kurang beruntung untuk tidak mempunyai sosok orangtua. Maka dari itu masih banyak anak yang perkembangannya masih kurang dan harus lebih diperhatikan lagi untuk perkembangannya.

Saat ini pembangunan nasional dapat dilihat melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan akan mempengaruhi kualitas setiap manusia. Pembangunan nasional mempunyai tujuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan potensi dan martabat masyarakat Indonesia dengan berpedoman Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Untuk menuju manusia yang berkualitas dibutuhkan pendidikan yang cukup tinggi. Melalui Pendidikan manusia akan terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi yang terus diperbarui dengan potensi yang sudah dipelajari pada Pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu cukup penting pendidikan untuk anak-anak di Indonesia membantu dalam pembangunan nasional.

Gambar 4.1 Data Jumlah LKSA dan Jumlah Anak Terlantar Di Jawa Timur

No.	Kab/Kota	Jumlah LKSA	Jumlah Anak Keseluruhan
1.	Kabupaten Bangkalan	27	2224
2.	Kabupaten Banyuwangi	10	645
3.	Kabupaten Blitar	20	986
4.	Kabupaten Bojonegoro	43	3360
5.	Kabupaten Bondowoso	31	1786
6.	Kabupaten Gresik	24	1628
7.	Kabupaten Jember	53	2174
8.	Kabupaten Jombang	16	1149
9.	Kabupaten Kediri	21	4795
10.	Kabupaten Lamongan	46	3115
11.	Kabupaten Lumajang	68	3336
12.	Kabupaten Madiun	18	1516
13.	Kabupaten Magetan	18	2524
14.	Kabupaten Malang	35	2488
15.	Kabupaten Mojokerto	24	805
16.	Kabupaten Nganjuk	17	979
17.	Kabupaten Ngawi	6	3034
18.	Kabupaten Pacitan	10	680
19.	Kabupaten Pamekasan	31	3813
20.	Kabupaten Pasuruan	33	6824
21.	Kabupaten Ponorogo	44	3144
22.	Kabupaten Probolinggo	41	2639
23.	Kabupaten Sampang	26	1378
24.	Kabupaten Sidoarjo	90	5276
25.	Kabupaten Situbondo	20	1433
26.	Kabupaten Sumenep	32	2519
27.	Kabupaten Trenggalek	15	1247
28.	Kabupaten Tuban	15	1182
29.	Kabupaten Tulungagung	11	425
30.	Kota Batu	13	545
31.	Kota Blitar	5	270
32.	Kota Kediri	14	937
33.	Kota Madiun	9	740
34.	Kota Malang	38	2542
35.	Kota Mojokerto	5	178
36.	Kota Pasuruan	6	344
37.	Kota Probolinggo	9	580
38.	Kota Surabaya	66	5156

● : Kabupaten atau Kota dengan jumlah anak LKSA terbanyak

● : Kabupaten atau Kota dengan jumlah anak LKSA tersedikit

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Fenomena anak terlantar di atas juga akan mempengaruhi pola pikir mereka tentang Pendidikan. Tidak adanya peran orangtua untuk memotivasi anak akan membuat pikiran anak menjadi meremehkan Pendidikan. Oleh karena itu kontribusi dari pemerintah penting dalam menangani kasus ini guna mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Peran pemerintah tersebut juga didukung dengan UU 35 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pada UUD Pasal 34 Tahun 1945 juga sudah dijelaskan bahwa merupakan tanggung jawab negara guna melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Melalui dua UU di atas sudah sepatutnya pemerintah ikut serta untuk memelihara anak terlantar sesuai dengan kewajibannya.

Dalam tujuan kesejahteraan anak maka muncul program pengangkatan anak atau adopsi. Adopsi atau pengangkatan anak yang dikemukakan oleh Arief Gosita dalam (Hulu, 2018) merupakan tindakan dalam pengambilan atau pengangkatan anak orang yang wajib dirawat dan dijadikan sebagai anak turunan, berdasarkan prosedur yang telah disepakati dengan dijamin oleh hukum yang dijalankan dalam masyarakat atau negara tertentu. Di negara Indonesia, adopsi anak dapat dikatakan sebagai kebutuhan kebutuhan masyarakat tertentu dan

merupakan suatu bagian sistem hukum keluarga, hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan seseorang dalam suatu keluarga tertentu.

Di Indonesia program pengangkatan anak memiliki tujuan untuk meneruskan garis keturunan. Lembaga pengangkatan anak merupakan tempat yang dibutuhkan oleh setiap suami istri tertentu yang merindukan kehadiran seorang anak. Hingga saat ini semakin banyak lembaga-lembaga yang bergerak dalam pengangkatan anak sudah berkembang luas, selain itu lembaga tersebut tidak hanya melanjutkan keturunan saja. Motivasi mengenai pengangkatan anak sangat berpengaruh terhadap berkembangnya lembaga pengangkatan anak. (Husnah, 2015)

Dinas sosial merupakan salah satu lembaga yang memperkerjakan pekerja sosial yang terlibat pada tata pengelolaan sosial dengan maksud meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui beberapa program dalam melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Salah satu program yang dimaksud yaitu pengangkatan anak atau adopsi anak. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan layanan bagi masyarakat yang akan adopsi anak, hal ini dilakukan sesuai prosedur hukum. (Panama & Kurnianingsih, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang tercantum pada pasal 2 yaitu Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kepentingan bagi seorang anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bagaimana proses pengangkatan anak yang didalamnya terdapat beberapa *point* penting guna untuk menjamin dan melindungi anak atas haknya agar mendapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara normal seperti manusia pada umunya. (Siregar, 2019). Dengan adanya payung hukum tersebut maka untuk para suami istri tertentu yang mengalami kondisi merindukan kehadiran seorang anak tetapi tidak bisa melalui rahimnya sendiri, makadari itu calon orang tua angkat (COTA) dapat melalui tata cara pengangkatan anak tersebut.

METODE PENELITIAN

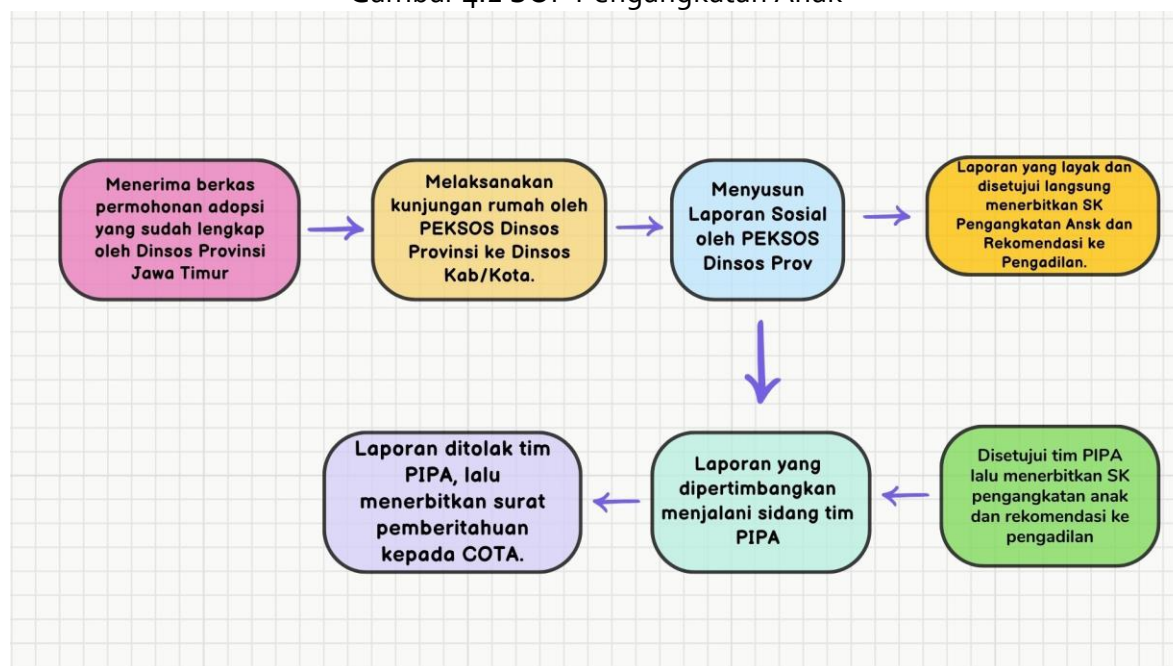
Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang di dalamnya terdapat wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mendapatkan data yang menggambarkan keadaan proses pengangkatan anak atau adopsi melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Menurut Creswell dalam (Hera & Elvandari, 2021). Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian Dimana seorang peneliti menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam memperoleh data seorang peneliti melakukan beberapa cara yaitu membuat dan membatasi pertanyaan spesifik, mengumpulkan data dari partisipan, dan melakukan penelitian secara obyektif tanpa memihak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dapat dilihat bahwa keberadaan anak terlantar masih dibilang cukup tinggi. Permasalahan ini berakibat pada perkembangan anak masih banyak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dan akan menjadikan anak-anak kurang menyadari motivasi dalam setiap perkembangan mereka. Berikut ini adalah alur dalam menjalani Pengangkatan Anak di Jawa Timur.

Gambar 4.2 SOP Pengangkatan Anak



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang kompleks dan masih menjadi persoalan di semua daerah bahkan negara maju sekalipun. Tujuan kebijakan merupakan aspek penting dalam proses implementasi dan disamping aspek sasaran yang akan dituju. Begitu juga dengan kebijakan program Adopsi dalam menangani anak terlantar yang implementasinya perlu diperhatikan agar tujuan menangani anak terlantar demi tercapainya kesejahteraan anak. Keberhasilan implementasi kebijakan Adopsi dapat dianalisis menggunakan teori yang telah dikemukakan George C. Edwards III.

A. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mendapatkan satu pemikiran yang sama dan saling mengerti satu sama lain. Dalam pelaksanaan program Adopsi anak komunikasi yang dilakukan oleh petugas dari instansi terkait yaitu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Segala bentuk kebijakan ataupun program termasuk program adopsi anak harus terjalin adanya komunikasi yang baik agar program berjalan dengan baik.

Dalam terlaksananya program Adopsi harus terjalin komunikasi baik antar individu, hubungan antar individu, antar kelompok, hingga hubungan individu dengan kelompok. Pada program Adopsi komunikasi merupakan aspek penting sebagai jembatan antara pemerintah dengan Calon Orang tua Angkat (COTA) serta dengan instansi yang terkait. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki website bernama Area COTA yang didalamnya membantu para COTA untuk mengajukan berkas yang nantinya akan diverifikasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Namun website tersebut banyak mengalami kendala dalam pengaksesannya yang harus ditindak lanjuti. Dalam program Adopsi anak perlu diperhatikan terkait dengan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat. Banyak pasangan suami istri yang menginginkan melakukan adopsi anak, maka hal ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi mis komunikasi terhadap kedua belah pihak yakni Calon Orang Tua Angkat (COTA) dengan lembaga adopsi anak. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai adopsi anak dengan cara mengumpulkan instansi terkait yakni Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan juga petugas dari rumah sakit tertentu guna memberikan bantuan dalam segi Kesehatan kepada calon anak angkat (CAA).

Dalam menjalankan proses Adopsi Anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bekerjasama dan berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait untuk mempertimbangkan segala pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban calon anak angkat yang harus terpenuhi dan juga pertimbangan kelayakan calon orang tua angkat yang akan mengadopsi anak. Terdapat lembaga pertimbangan perizinan pengangkatan anak diantaranya, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, PSAK bagian perlindungan anak dan pendidikan, Dinas Kesehatan, LPA, Polda, Yayasan Matahari Terbit, dan Pengadilan Negeri.

B. Sumber Daya

Dalam implementasi suatu kebijakan ataupun suatu program dibutuhkan peran penting dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang cukup dan terlatih dengan baik diperlukan untuk menangani proses adopsi. Sumber Daya manusia yang dimaksud adalah termasuk pekerja sosial, ahli hukum, staf pendukung dari instansi salah satunya Dinas Sosial Jawa Timur, dan juga calon orang tua angkat yang menjalankan proses adopsi anak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sesuai tata hukum. Hal yang diperlukan dalam implementasi suatu program salah satunya adopsi anak.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga bertanggung jawab dalam mengetahui keadaan calon orang tua angkat baik dalam segi kecukupan harta, kecukupan dalam memenuhi hak calon anak angkat mulai dari pendidikan Kesehatan dan sebagainya, dan juga memberikan kelayakan tempat tinggal. Atas hal tersebut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan survei langsung ke lokasi calon orang tua angkat. Dalam menjalankan survei tersebut pihak Dinas Sosial Jawa Timur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dengan jumlah sebesar Rp 124.032.000.

Dalam proses adopsi anak terdapat beberapa prosedur yang harus dijalankan oleh COTA sebagai berikut, Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial setempat. Petugas dari Dinas Sosial akan berkunjung (*Home Visit*) ke rumah dan memastikan kondisi perekonomian dan sosial dari keluarga COTA. Jika dinilai layak, Dinas Sosial akan memberikan surat izin pengasuhan dalam jangka waktu sementara dan dilakukan pengawasan serta bimbingan selama waktu pengasuhan yang ditetapkan. Selanjutnya dalam persidangan harus menghadirkan minimal dua orang saksi. Dalam persidangan akan ditetapkan keputusan permohonan adopsi anak telah disetujui ataupun ditolak. Orang tua angkat perlu melaporkan salinan Keputusan dari pengadilan tersebut ke Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota. Calon anak angkat yang berasal dari panti asuhan dan yayasan harus memiliki surat ijin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan tersebut telah diijinkan melakukan proses pengangkatan anak.

C. Disposisi

Disposisi harus dijalankan oleh pihak implementor karena berperan penting yang berhubungan dengan sikap yang dimiliki oleh pihak implementor. Dalam pola pengawasan pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan tanggung jawab kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yaitu melakukan sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepada orang tua angkat.

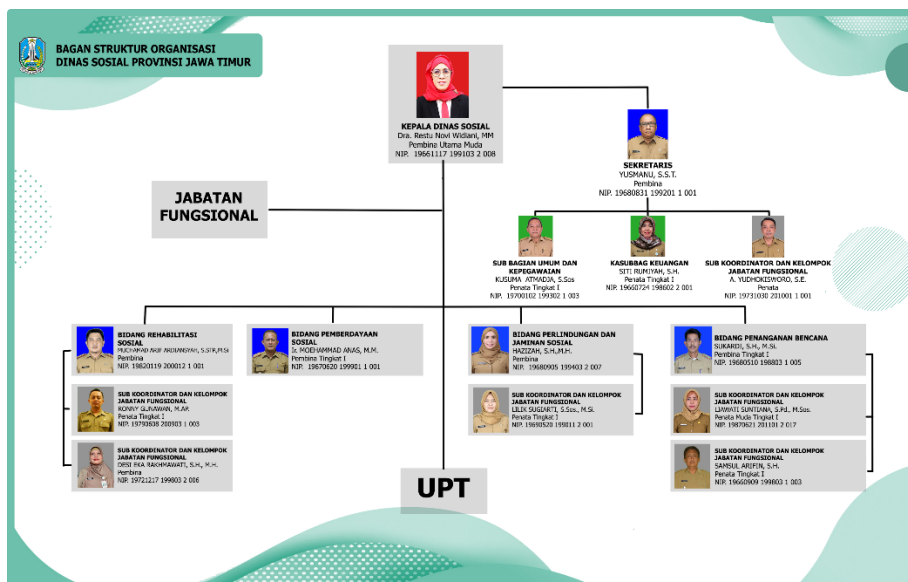
Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak begitu berperan penting dalam proses pengawasan namun perlu diperhatikan bahwa Dinas sosial Provinsi Jawa Timur berkewajiban dalam membantu proses adopsi anak oleh calon orang tua angkat dan melakukan pengecekan secara berkala terhadap lembaga-lembaga adopsi anak termasuk LKSA yang dimana lembaga ini memberikan layanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup seorang anak.

D. Struktur Birokrasi

Edward III menjelaskan bahwa dalam struktur birokrasi terdapat fragmentasi dalam memudahkan birokrat melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam kasus penelitian ini, bagaimana berjalannya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak sebagai salah satu solusi anak terlantar terbilang cukup kompleks dan menuntut kerjasama antara beberapa pihak demi terimplementasinya kebijakan ini sebagaimana mustinya.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki 4 sub bidang dimana masing-masing bidang memiliki fungsi dan tanggung jawabnya tersendiri. Untuk pengelolaan tentang kesejahteraan anak dan pengangkatan anak di Jawa Timur diangungi oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam bidang ini kemudian dibagi menjadi beberapa seksi diantaranya subkoor, Peksos, Pengelola Data dan Pengadministrasi. Dalam rangka pengelolaan program pengangkatan anak, Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia melakukan pembinaan dan bekerjasama dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Jawa Timur guna memaksimalkan peran masyarakat. Setiap UPT melaksanakan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

Gambar 4.3 Struktur Birokrasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Pembahasan

Banyaknya anak terlantar yang ada di Indonesia menjadi salah satu persoalan yang cukup rumit. Jumlah anak terlantar mencapai angka yang cukup besar khususnya di Jawa Timur. Masalah anak terlantar perlu penanganan khusus dari pemerintah agar dapat menangani persoalan tersebut sehingga kesejahteraan anak serta pembangunan nasional berjalan dengan baik. Dalam rangka mensejahterakan anak terutama anak terlantar, pemerintah membuat kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yang merupakan salah satu solusi dalam masalah anak terlantar supaya anak mendapat hak dalam kesejahteraan anak. Dalam pengimplementasian kebijakan ini di Jawa Timur terdapat lembaga yang menaungi program tersebut. Lembaga itu adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur hingga Kabupaten atau Kota. Program adopsi ini merupakan langkah pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan anak dimana nantinya anak terlantar akan diangkat sebagai anak yang tercatat dalam Negara oleh Calon Orang tua Angkat.

Jika dilihat dari faktor komunikasi, komunikasi dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berjalan dengan baik. Mulai dari Calon Orang Tua Angkat (COTA), keluarga ataupun Yayasan Calon Anak Angkat (CAA) sampai ke struktur birokrasi dalam Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam terlaksananya pengangkatan anak memerlukan sumber daya mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pekerja sosial, ahli hukum, staf pendukung dari instansi salah satunya Dinas Sosial Jawa Timur, dan juga Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang menjalankan proses adopsi anak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan hukum, kemudian terdapat juga sumber daya anggaran yang menunjang kegiatan pengangkatan anak.

Berdasarkan penguraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang menjadi implementor kebijakan dan merupakan pemegang kendali utama. Komunikasi yang dilakukan oleh setiap sumber daya manusia juga menjadi satu hal penting dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur harus memperbaiki website 'Area COTA' agar memudahkan para COTA dalam pengumpulan berkas.

KESIMPULAN

Program pengangkatan anak atau Adopsi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Program pengangkatan anak ini memiliki sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 124.032.000. Pengangkatan anak dilaksanakan oleh banyak orang tua yang merindukan kehadiran seorang anak. Orang tua tersebut akan mewujudkan keinginannya untuk mempunyai anak dibantu dengan Dinas Sosial di dalamnya.

Dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak sudah terlaksana secara efektif, dilihat dengan teori George Edward III yang memiliki beberapa indikator. Aspek komunikasi teralisasi dengan adanya website Area COTA yang memberikan kemudahan dalam pengumpulan berkas. Meskipun demikian, website Area COTA mengalami beberapa kendala seperti error yang membuat pengumpulan berkas oleh COTA harus kembali secara manual. Adanya website yang baik akan memberikan kemudahan COTA dalam pengajuan berkas pengangkatan anak. Sebaiknya Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dibantu dengan orang-orang yang berkaitan dalam pembuatan website agar website tersebut lebih diperhatikan dan langsung melakukan perbaikan mengingat website tersebut memudahkan COTA. Komunikasi dengan COTA juga berjalan dengan baik dengan dibantunya Dinas Sosial dan UPT di setiap Kabupaten dan Kota dapat melaksanakan sosialisasi agar dalam koordinasi Pemerintah dengan para COTA dapat berjalan dengan baik. Selain itu, sumber daya juga menjadi aspek penting dalam terlaksananya pengembangan dan pengelolaan program pengangkatan anak di Jawa Timur. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur dan sumber daya manusia yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial serta UPT di setiap Kabupaten atau Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Ainemer, A. I., Krasnov, S. G., Popoy, V. E., Romm, E. S., Sudarikov, S. M., & Cherkashov, G. A. (1990). Hydrothermal systems of the Pacific Ocean. *Marine Mining*, 9(1), 105–115
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2020). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia. *Kerthanegara*, 8(2), 5.
- Harmaini. (2013). Keberadaan Orang Tua Bersama Anak. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(Desember), 80–93.
- Hera, T., & Elvandari, E. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Explicit Instruction Pada Pembelajaran Tari Daerah Sebagai Dasar Keterampilan Menari Tradisi. *Jurnal Sitakara*, 6(1), 40–54. <https://doi.org/10.31851/sitakara.v6i1.5286>
- Husnah, H. (2015). Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Indonesia Judul Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Indonesia.
- Hulu, K. I. (2018). Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Education and Development*, 5(1), 75–86. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/487>
- Panama, R. A., & Kurnianingsih, M. (2023). Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak di Sragen. *Jurnal Interpretasi ...*, 4(1), 121–132. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6654> <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/6654/4467>
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Jurnal bimbingan Konseling Isla*, 6(1), 1–18.
- Siregar, S. (2019). Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan). *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 428. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i1.428-442>
- Zilvana, Z., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Keluarga Pada Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 173. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33764>